PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial merupakan hasil perhitungan intensitas serta beban kerja pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan nilai variabel urusan pemerintahan daerah bidang sosial baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Pasal 2

Nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan kriteria variabel umum dan teknis.

Pasal 3

Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri atas indikator:

a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri atas:

a. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang di rehabilitasi dalam panti baik milik pemerintah daerah maupun milik masyarakat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam jiwa; dan
b. jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang wilayah kerjanya lintaskabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 5

Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas:

a. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti;
b. jumlah fakir miskin dalam kabupaten/kota;
c. jumlah jiwa dalam komunitas adat terpencil; dan
d. jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kabupaten/kota.

Pasal 6

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, standardisasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran.
(2) Penetapan kelembagaan perangkat daerah, standardisasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 9

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang sosial dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 10

Evaluasi perubahan bobot intensitas dan beban kerja hasil pemetaan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas persetujuan Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1589

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA.

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
1		PROVINSI ACEH	924	Besar
	1.01	Kab. Aceh Barat	825	Besar
	1.02	Kab. Aceh Besar	761	Sedang
	1.03	Kab. Aceh Selatan	845	Besar
	1.04	Kab. Aceh Singkil	660	Sedang
	1.05	Kab. Aceh Tengah	488	Kecil
	1.06	Kab. Aceh Tenggara	814	Besar
	1.07	Kab. Aceh Timur	631	Sedang
	1.08	Kab. Aceh Utara	836	Besar
	1.09	Kab. Bireuen	851	Besar
	1.10	Kab. Pidie	845	Besar
	1.11	Kab. Simeulue	717	Sedang
	1.12	Kota Banda Aceh	801	Besar
	1.13	Kota Sabang	136	Kecil
	1.14	Kota Langsa	312	Kecil
	1.15	Kota Lhokseumawe	455	Kecil
	1.16	Kab. Gayo Lues	570	Kecil
	1.17	Kab. Aceh Barat Daya	700	Sedang
	1.18	Kab. Aceh Jaya	574	Kecil
	1.19	Kab. Nagan Raya	829	Besar
	1.20	Kab. Aceh Tamiang	631	Sedang
	1.21	Kab. Bener Meriah	823	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	1.22	Kab. Pidie Jaya	823	Besar
	1.23	Kota Subulussalam	682	Sedang
2		PROVINSI SUMATERA UTARA	990	Besar
	2.01	Kab. Asahan	946	Besar
	2.02	Kab. Dairi	847	Besar
	2.03	Kab. Deli Serdang	975	Besar
	2.04	Kab. Karo	645	Sedang
	2.05	Kab. Labuhan Batu	946	Besar
	2.06	Kab. Langkat	627	Sedang
	2.07	Kab. Mandailing Natal	796	Sedang
	2.08	Kab. Nias	722	Sedang
	2.09	Kab. Simalungun	876	Besar
	2.10	Kab. Tapanuli Selatan	924	Besar
	2.11	Kab. Tapanuli Tengah	825	Besar
	2.12	Kab. Tapanuli Utara	741	Sedang
	2.13	Kab. Toba Samosir	867	Besar
	2.14	Kota Binjai	913	Besar
	2.15	Kota Medan	924	Besar
	2.16	Kota Pematang Siantar	587	Kecil
	2.17	Kota Sibolga	356	Kecil
	2.18	Kota Tanjung Balai	816	Besar
	2.19	Kota Tebing Tinggi	515	Kecil
	2.20	Kota Padang Sidimpuan	774	Sedang
	2.21	Kab. Pakpak Bharat	389	Kecil
	2.22	Kab. Nias Selatan	543	Kecil
	2.23	Kab. Humbang Hasundutan	572	Kecil
	2.24	Kab. Serdang Bedagai	946	Besar
	2.25	Kab. Samosir	618	Sedang
	2.26	Kab. Batu Bara	845	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	2.27	Kab. Padang Lawas	818	Besar
	2.28	Kab. Padang Lawas Utara	631	Sedang
	2.29	Kab. Labuhan Batu Selatan	488	Kecil
	2.30	Kab. Labuhan Batu Utara	917	Besar
	2.31	Kab. Nias Utara	459	Kecil
	2.32	Kab. Nias Barat	641	Sedang
	2.33	Kota Gunung Sitoli	387	Kecil
3		PROVINSI SUMATERA BARAT	902	Besar
	3.01	Kab. Lima puluh Kota	658	Sedang
	3.02	Kab. Agam	730	Sedang
	3.03	Kab. Kepulauan Mentawai	888	Besar
	3.04	Kab. Padang Pariaman	957	Besar
	3.05	Kab. Pasaman	878	Besar
	3.06	Kab. Pesisir Selatan	840	Besar
	3.07	Kab. Sijunjung	840	Besar
	3.08	Kab. Solok	959	Besar
	3.09	Kab. Tanah Datar	814	Besar
	3.10	Kota Bukit Tinggi	374	Kecil
	3.11	Kota Padang Panjang	235	Kecil
	3.12	Kota Padang	1,001	Besar
	3.13	Kota Payakumbuh	515	Kecil
	3.14	Kota Sawahlunto	576	Kecil
	3.15	Kota Solok	235	Kecil
	3.16	Kota Pariaman	741	Sedang
	3.17	Kab. Pasaman Barat	796	Sedang
	3.18	Kab. Dharmasraya	704	Sedang
	3.19	Kab. Solok Selatan	675	Sedang
4		PROVINSI RIAU	946	Besar
	4.01	Kab. Bengkalis	906	Besar
	4.02	Kab. Indragiri Hilir	986	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	4.03	Kab. Indragiri Hulu	631	Sedang
	4.04	Kab. Kampar	933	Besar
	4.05	Kab. Kuantan Singingi	708	Sedang
	4.06	Kab. Pelalawan	612	Sedang
	4.07	Kab. Rokan Hilir	763	Sedang
	4.08	Kab. Rokan Hulu	873	Besar
	4.09	Kab. Siak	818	Besar
	4.10	Kota Dumai	521	Kecil
	4.11	Kota Pekanbaru	922	Besar
	4.12	Kab. Kepulauan Meranti	631	Sedang
5		PROVINSI KEPULAUAN RIAU	910	Besar
	5.01	Kab. Natuna	411	Kecil
	5.02	Kab. Kep. Anambas	510	Kecil
	5.03	Kab. Karimun	756	Sedang
	5.04	Kota Batam	812	Besar
	5.05	Kota Tanjung Pinang	958	Besar
	5.06	Kab. Lingga	440	Kecil
	5.07	Kab. Bintan	627	Sedang
6		PROVINSI JAMBI	1,001	Besar
	6.01	Kab. Batanghari	804	Besar
	6.02	Kab. Bungo	638	Sedang
	6.03	Kab. Kerinci	845	Besar
	6.04	Kab. Merangin	737	Sedang
	6.05	Kab. Muaro Jambi	904	Besar
	6.06	Kab. Sarolangun	818	Besar
	6.07	Kab. Tanjung Jabung Barat	611	Sedang
	6.08	Kab. Tanjung Jabung Timur	878	Besar
	6.09	Kab. Tebo	869	Besar
	6.10	Kota Jambi	873	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	6.11	Kota Sungai Penuh	759	Sedang
7		PROVINSI SUMATERA SELATAN	803	Besar
	7.01	Kab. Lahat	818	Besar
	7.02	Kab. Musi Banyuasin	1,012	Besar
	7.03	Kab. Musi Rawas	858	Besar
	7.04	Kab. Muara Enim	979	Besar
	7.05	Kab. Ogan Komering Ilir	1,005	Besar
	7.06	Kab. Ogan Komering Ulu	924	Besar
	7.07	Kota Palembang	979	Besar
	7.08	Kota Pagar Alam	440	Kecil
	7.09	Kota Lubuk Linggau	818	Besar
	7.10	Kota Prabumulih	909	Besar
	7.11	Kab. Banyuasin	873	Besar
	7.12	Kab. Ogan Ilir	675	Sedang
	7.13	Kab. OKU Timur	979	Besar
	7.14	Kab. OKU Selatan	957	Besar
	7.15	Kab. Empat Lawang	640	Sedang
	7.16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	953	Besar
	7.17	Kab. Musi Rawas Utara	506	Kecil
8		PROVINSI BANGKA BELITUNG	826	Besar
	8.01	Kab. Bangka	851	Besar
	8.02	Kab. Belitung	552	Kecil
	8.03	Kota Pangkal Pinang	801	Besar
	8.04	Kab. Bangka Selatan	854	Besar
	8.05	Kab. Bangka Tengah	860	Besar
	8.06	Kab. Bangka Barat	753	Sedang
	8.07	Kab. Belitung Timur	613	Sedang
9		PROVINSI BENGKULU	803	Besar
	9.01	Kab. Bengkulu Selatan	812	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	9.02	Kab. Bengkulu Utara	878	Besar
	9.03	Kab. Rejang Lebong	517	Kecil
	9.04	Kota Bengkulu	898	Besar
	9.05	Kab. Kaur	799	Sedang
	9.06	Kab. Seluma	510	Kecil
	9.07	Kab. Mukomuko	451	Kecil
	9.08	Kab. Lebong	334	Kecil
	9.09	Kab. Kepahiang	521	Kecil
	9.10	Kab. Bengkulu Tengah	785	Sedang
10		PROVINSI LAMPUNG	1,012	Besar
	10.01	Kab. Lampung Barat	704	Sedang
	10.02	Kab. Lampung Selatan	1,199	Besar
	10.03	Kab. Lampung Tengah	981	Besar
	10.04	Kab. Lampung Utara	900	Besar
	10.05	Kab. Lampung Timur	1,001	Besar
	10.06	Kab. Tanggamus	900	Besar
	10.07	Kab. Tulang Bawang	878	Besar
	10.08	Kab. Way Kanan	924	Besar
	10.09	Kota Bandar Lampung	902	Besar
	10.10	Kota Metro	484	Kecil
	10.11	Kab. Pesawaran	873	Besar
	10.12	Kab. Pringsewu	891	Besar
	10.13	Kab. Mesuji	783	Sedang
	10.14	Kab. Tulang Bawang Barat	814	Besar
	10.15	Kab. Pesisir Barat	715	Sedang
11		PROVINSI JAWA BARAT	1,200	Besar
	11.01	Kab. Bandung	1,040	Besar
	11.02	Kab. Bekasi	940	Besar
	11.03	Kab. Bogor	970	Besar
	11.04	Kab. Ciamis	904	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	11.05	Kab. Cianjur	910	Besar
	11.06	Kab. Cirebon	910	Besar
	11.07	Kab. Garut	994	Besar
	11.08	Kab. Indramayu	910	Besar
	11.09	Kab. Karawang	910	Besar
	11.10	Kab. Kuningan	840	Besar
	11.11	Kab. Majalengka	874	Besar
	11.12	Kab. Purwakarta	494	Kecil
	11.13	Kab. Subang	964	Besar
	11.14	Kab. Sukabumi	970	Besar
	11.15	Kab. Sumedang	952	Besar
	11.16	Kab. Tasikmalaya	922	Besar
	11.17	Kota Bandung	880	Besar
	11.18	Kota Bekasi	880	Besar
	11.19	Kota Bogor	802	Besar
	11.20	Kota Cirebon	464	Kecil
	11.21	Kota Depok	848	Besar
	11.22	Kota Sukabumi	464	Kecil
	11.23	Kota Cimahi	600	Sedang
	11.24	Kota Tasikmalaya	764	Sedang
	11.25	Kota Banjar	778	Sedang
	11.26	Kab. Bandung Barat	946	Besar
	11.27	Kab. Pangandaran	480	Kecil
12		PROVINSI BANTEN	1,000	Besar
	12.01	Kab. Lebak	1,000	Besar
	12.02	Kab. Pandeglang	916	Besar
	12.03	Kab. Serang	852	Besar
	12.04	Kab. Tangerang	970	Besar
	12.05	Kota Cilegon	924	Besar
	12.06	Kota Tangerang	968	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	12.07	Kota Serang	913	Besar
	12.08	Kota Tangerang Selatan	601	Sedang
13		PROVINSI JAWA TENGAH	1,000	Besar
	13.01	Kab. Banjarnegara	860	Besar
	13.02	Kab. Banyumas	970	Besar
	13.03	Kab. Batang	660	Sedang
	13.04	Kab. Blora	742	Sedang
	13.05	Kab. Boyolali	642	Sedang
	13.06	Kab. Brebes	680	Sedang
	13.07	Kab. Cilacap	1,000	Besar
	13.08	Kab. Demak	916	Besar
	13.09	Kab. Grobogan	940	Besar
	13.10	Kab. Jepara	940	Besar
	13.11	Kab. Karanganyar	460	Kecil
	13.12	Kab. Kebumen	928	Besar
	13.13	Kab. Kendal	878	Besar
	13.14	Kab. Klaten	1,000	Besar
	13.15	Kab. Kudus	768	Sedang
	13.16	Kab. Magelang	910	Besar
	13.17	Kab. Pati	676	Sedang
	13.18	Kab. Pekalongan	794	Sedang
	13.19	Kab. Pemalang	910	Besar
	13.20	Kab. Purbalingga	842	Besar
	13.21	Kab. Purworejo	872	Besar
	13.22	Kab. Rembang	866	Besar
	13.23	Kab. Semarang	926	Besar
	13.24	Kab. Sragen	920	Besar
	13.25	Kab. Sukoharjo	880	Besar
	13.26	Kab. Tegal	1,000	Besar
	13.27	Kab. Temanggung	890	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	13.28	Kab. Wonogiri	886	Besar
	13.29	Kab. Wonosobo	796	Sedang
	13.30	Kota Magelang	510	Kecil
	13.31	Kota Pekalongan	796	Sedang
	13.32	Kota Salatiga	752	Sedang
	13.33	Kota Semarang	1,012	Besar
	13.34	Kota Surakarta	957	Besar
	13.35	Kota Tegal	438	Kecil
14		PROVINSI DKI JAKARTA	1,000	Besar
	14.01	Kota Jakarta Pusat	792	Sedang
	14.02	Kota Jakarta Timur	583	Kecil
	14.03	Kota Jakarta Selatan	693	Sedang
	14.04	Kota Jakarta Barat	682	Sedang
	14.05	Kota Jakarta Utara	572	Kecil
	14.06	Kab. Kepulauan Seribu	753	Sedang
15		PROVINSI JAWA TIMUR	1,000	Besar
	15.01	Kab. Bangkalan	814	Besar
	15.02	Kab. Banyuwangi	868	Besar
	15.03	Kab. Blitar	910	Besar
	15.04	Kab. Bojonegoro	910	Besar
	15.05	Kab. Bondowoso	890	Besar
	15.06	Kab. Gresik	910	Besar
	15.07	Kab. Jember	874	Besar
	15.08	Kab. Jombang	694	Sedang
	15.09	Kab. Kediri	862	Besar
	15.10	Kab. Lamongan	868	Besar
	15.11	Kab. Lumajang	868	Besar
	15.12	Kab. Madiun	842	Besar
	15.13	Kab. Magetan	866	Besar
	15.14	Kab. Malang	1,000	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	15.15	Kab. Mojokerto	910	Besar
	15.16	Kab. Nganjuk	940	Besar
	15.17	Kab. Ngawi	674	Sedang
	15.18	Kab. Pacitan	920	Besar
	15.19	Kab. Pamekasan	878	Besar
	15.20	Kab. Pasuruan	844	Besar
	15.21	Kab. Ponorogo	848	Besar
	15.22	Kab. Probolinggo	862	Besar
	15.23	Kab. Sampang	854	Besar
	15.24	Kab. Sidoarjo	892	Besar
	15.25	Kab. Situbondo	848	Besar
	15.26	Kab. Sumenep	880	Besar
	15.27	Kab. Trenggalek	920	Besar
	15.28	Kab. Tuban	892	Besar
	15.29	Kab. Tulungagung	910	Besar
	15.30	Kota Blitar	741	Sedang
	15.31	Kota Kediri	697	Sedang
	15.32	Kota Madiun	583	Kecil
	15.33	Kota Malang	909	Besar
	15.34	Kota Mojokerto	779	Sedang
	15.35	Kota Pasuruan	834	Besar
	15.36	Kota Probolinggo	693	Sedang
	15.37	Kota Surabaya	979	Besar
	15.38	Kota Batu	394	Kecil
16		PROVINSI KALIMANTAN BARAT	924	Besar
	16.01	Kab. Bengkayang	508	Kecil
	16.02	Kab. Landak	737	Sedang
	16.03	Kab. Kapuas Hulu	1,042	Besar
	16.04	Kab. Ketapang	900	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	16.05	Kab. Mempawah	937	Besar
	16.06	Kab. Sambas	1,246	Besar
	16.07	Kab. Sanggau	990	Besar
	16.08	Kab. Sintang	464	Kecil
	16.09	Kota Pontianak	759	Sedang
	16.10	Kota Singkawang	829	Besar
	16.11	Kab. Sekadau	979	Besar
	16.12	Kab. Melawi	741	Sedang
	16.13	Kab. Kayong Utara	418	Kecil
	16.14	Kab. Kubu Raya	919	Besar
17		PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	836	Besar
	17.01	Kab. Barito Selatan	792	Sedang
	17.02	Kab. Barito Utara	629	Sedang
	17.03	Kab. Kapuas	757	Sedang
	17.04	Kab. Kotawaringin Barat	818	Besar
	17.05	Kab. Kotawaringin Timur	664	Sedang
	17.06	Kota Palangkaraya	658	Sedang
	17.07	Kab. Katingan	783	Sedang
	17.08	Kab. Seruyan	796	Sedang
	17.09	Kab. Sukamara	400	Kecil
	17.10	Kab. Lamandau	719	Sedang
	17.11	Kab. Gunung Mas	816	Besar
	17.12	Kab. Pulang Pisau	818	Besar
	17.13	Kab. Murung Raya	829	Besar
	17.14	Kab. Barito Timur	781	Sedang
18		PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	902	Besar
	18.01	Kab. Banjar	979	Besar
	18.02	Kab. Barito Kuala	851	Besar
	18.03	Kab. Hulu Sungai Selatan	664	Sedang

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	18.04	Kab. Hulu Sungai Tengah	581	Kecil
	18.05	Kab. Hulu Sungai Utara	898	Besar
	18.06	Kab. Kota Baru	385	Kecil
	18.07	Kab. Tabalong	625	Sedang
	18.08	Kab. Tanah Laut	884	Besar
	18.09	Kab. Tapin	902	Besar
	18.10	Kota Banjar Baru	603	Sedang
	18.11	Kota Banjarmasin	825	Besar
	18.12	Kab. Balangan	935	Besar
	18.13	Kab. Tanah Bumbu	845	Besar
19		PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	968	Besar
	19.01	Kab. Kutai Kartanegara	1,012	Besar
	19.02	Kab. Kutai Barat	706	Sedang
	19.03	Kab. Kutai Timur	950	Besar
	19.04	Kab. Paser	405	Kecil
	19.05	Kota Balikpapan	979	Besar
	19.06	Kota Bontang	488	Kecil
	19.07	Kota Samarinda	810	Besar
	19.08	Kab. Berau	847	Besar
	19.09	Kab. Penajam Paser Utara	796	Sedang
	19.10	Kab. Mahakam Ulu	288	Kecil
20		PROVINSI KALIMANTAN UTARA	994	Besar
	20.01	Kab. Bulungan	526	Kecil
	20.02	Kab. Malinau	426	Kecil
	20.03	Kab. Nunukan	1,190	Besar
	20.04	Kab. Tarakan	471	Kecil
	20.05	Kab. Tana Tidung	384	Kecil
21		PROVINSI SULAWESI UTARA	1,106	Besar
	21.01	Kab. Bolaang Mongondow	807	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	21.02	Kab. Minahasa	717	Sedang
	21.03	Kab. Kepulauan Sangihe	896	Besar
	21.04	Kota Bitung	931	Besar
	21.05	Kota Manado	900	Besar
	21.06	Kab. Kepulauan Talaud	958	Besar
	21.07	Kab. Minahasa Selatan	378	Kecil
	21.08	Kota Tomohon	847	Besar
	21.09	Kab. Minahasa Utara	224	Kecil
	21.10	Kota Kotamobagu	407	Kecil
	21.11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	748	Sedang
	21.12	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro	655	Sedang
	21.13	Kab. Minahasa Tenggara	781	Sedang
	21.14	Kab. Bolaang Mangondow Timur	891	Besar
	21.15	Kab. Bolaang Mangondow Selatan	559	Kecil
22		PROVINSI GORONTALO	825	Besar
	22.01	Kab. Boalemo	682	Sedang
	22.02	Kab. Gorontalo	957	Besar
	22.03	Kota Gorontalo	528	Kecil
	22.04	Kab. Pohuwato	541	Kecil
	22.05	Kab. Bone Bolango	651	Sedang
	22.06	Kab. Gorontalo Utara	807	Besar
23		PROVINSI SULAWESI TENGAH	935	Besar
	23.01	Kab. Banggai	964	Besar
	23.02	Kab. Banggai Kepulauan	378	Kecil
	23.03	Kab. Buol	829	Besar
	23.04	Kab. Toli-Toli	926	Besar
	23.05	Kab. Donggala	880	Besar
	23.06	Kab. Morowali	337	Kecil
	23.07	Kab. Poso	825	Besar
	23.08	Kota Palu	869	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	23.09	Kab. Parigi Moutong	869	Besar
	23.10	Kab. Tojo Una Una	642	Sedang
	23.11	Kab. Sigi	741	Sedang
	23.12	Kab. Banggai Laut	627	Sedang
	23.13	Kab. Morowali Utara	345	Kecil
24		PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,023	Besar
	24.01	Kab. Bantaeng	964	Besar
	24.02	Kab. Barru	728	Sedang
	24.03	Kab. Bone	992	Besar
	24.04	Kab. Bulukumba	884	Besar
	24.05	Kab. Enrekang	950	Besar
	24.06	Kab. Gowa	946	Besar
	24.07	Kab. Jeneponto	920	Besar
	24.08	Kab. Luwu	950	Besar
	24.09	Kab. Luwu Utara	964	Besar
	24.10	Kab. Maros	970	Besar
	24.11	Kab. Pangkajene Kepulauan	361	Kecil
	24.12	Kota Palopo	931	Besar
	24.13	Kab. Luwu Timur	631	Sedang
	24.14	Kab. Pinrang	704	Sedang
	24.15	Kab. Sinjai	411	Kecil
	24.16	Kab. Kepulauan Selayar		Kecil
	24.17	Kab. Sidenreng Rappang	708	Sedang
	24.18	Kab. Soppeng	851	Besar
	24.19	Kab. Takalar	913	Besar
	24.20	Kab. Tana Toraja	581	Kecil
	24.21	Kab. Wajo	818	Besar
	24.22	Kota Pare-pare	752	Sedang
	24.23	Kota Makassar	975	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	24.24	Kab. Toraja Utara	953	Besar
25		PROVINSI SULAWESI BARAT	968	Besar
	25.01	Kab. Majene	704	Sedang
	25.02	Kab. Mamuju	708	Sedang
	25.03	Kab. Polewali Mandar	1,012	Besar
	25.04	Kab. Mamasa	873	Besar
	25.05	Kab. Mamuju Utara	840	Besar
	25.06	Kab. Mamuju Tengah	603	Sedang
26		PROVINSI SULAWESI TENGGARA	858	Besar
	26.01	Kab. Buton	675	Sedang
	26.02	Kab. Konawe	684	Sedang
	26.03	Kab. Kolaka	937	Besar
	26.04	Kab. Muna	880	Besar
	26.05	Kota Kendari	871	Besar
	26.06	Kota Bau-bau	763	Sedang
	26.07	Kab. Konawe Selatan	983	Besar
	26.08	Kab. Bombana	678	Sedang
	26.09	Kab. Wakatobi	756	Sedang
	26.10	Kab. Kolaka Utara	818	Besar
	26.11	Kab. Konawe Utara	572	Kecil
	26.12	Kab. Buton Utara	403	Kecil
	26.13	Kab. Konawe Kepulauan	299	Kecil
	26.14	Kab. Kolaka Timur	834	Besar
	26.15	Kab. Muna Barat	1,134	Besar
	26.16	Kab. Buton Tengah	697	Sedang
	26.17	Kab. Buton Selatan	1,000	Besar
27		PROVINSI BALI	880	Besar
	27.01	Kab. Badung	790	Sedang
	27.02	Kab. Bangli	760	Sedang

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	27.03	Kab. Buleleng	788	Sedang
	27.04	Kab. Gianyar	686	Sedang
	27.05	Kab. Jembrana	468	Kecil
	27.06	Kab. Karangasem	790	Sedang
	27.07	Kab. Klungkung	620	Sedang
	27.08	Kab. Tabanan	540	Kecil
	27.09	Kota Denpasar	849	Besar
28		PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	938	Besar
	28.01	Kab. Bima	967	Besar
	28.02	Kab. Dompu	900	Besar
	28.03	Kab. Lombok Barat	953	Besar
	28.04	Kab. Lombok Tengah	998	Besar
	28.05	Kab. Lombok Timur	1,200	Besar
	28.06	Kab. Sumbawa	958	Besar
	28.07	Kota Mataram	697	Sedang
	28.08	Kota Bima	790	Sedang
	28.09	Kab. Sumbawa Barat	1,020	Besar
	28.10	Kab. Lombok Utara	365	Kecil
29		PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	896	Besar
	29.01	Kab. Alor	938	Besar
	29.02	Kab. Belu	1,196	Besar
	29.03	Kab. Ende	1,080	Besar
	29.04	Kab. Flores Timur	1,032	Besar
	29.05	Kab. Kupang	1,125	Besar
	29.06	Kab. Lembata	442	Kecil
	29.07	Kab. Manggarai	946	Besar
	29.08	Kab. Ngada	449	Kecil
	29.09	Kab. Sikka	1,051	Besar
	29.10	Kab. Sumba Barat	989	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	29.11	Kab. Sumba Timur	958	Besar
	29.12	Kab. Timor Tengah Selatan	994	Besar
	29.13	Kab. Timor Tengah Utara	1,080	Besar
	29.14	Kota Kupang	917	Besar
	29.15	Kab. Rote Ndao	866	Besar
	29.16	Kab. Manggarai Barat	902	Besar
	29.17	Kab. Nagekeo	917	Besar
	29.18	Kab. Sumba Barat Daya	917	Besar
	29.19	Kab. Sumba Tengah	377	Kecil
	29.20	Kab. Manggarai Timur	953	Besar
	29.21	Kab. Sabu Raijua	809	Besar
	29.22	Kab. Malaka	871	Besar
30		PROVINSI MALUKU	1,106	Besar
	30.01	Kab. Maluku Tenggara Barat	403	Kecil
	30.02	Kab. Maluku Tengah	1,159	Besar
	30.03	Kab. Maluku Tenggara	1,134	Besar
	30.04	Kab. Buru	929	Besar
	30.05	Kota Ambon	713	Sedang
	30.06	Kab. Seram Bagian Barat	905	Besar
	30.07	Kab. Seram Bagian Timur	204	Kecil
	30.08	Kab. Kepulauan Aru	929	Besar
	30.09	Kota Tual	880	Besar
	30.10	Kab. Maluku Barat Daya	569	Kecil
	30.11	Kab. Buru Selatan	1,020	Besar
31		PROVINSI MALUKU UTARA	1,148	Besar
	31.01	Kab. Halmahera Tengah	418	Kecil
	31.02	Kota Ternate	807	Besar
	31.03	Kab. Halmahera Barat	341	Kecil
	31.04	Kab. Halmahera Timur	473	Kecil
	31.05	Kab. Halmahera Selatan	509	Kecil
	31.06	Kab. Halmahera Utara	852	Besar

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	31.07	Kab. Kepulauan Sula	473	Kecil
	31.08	Kota. Tidore Kepulauan	591	Kecil
	31.09	Kab. Pulau Morotai	395	Kecil
	31.10	Kab. Pulau Taliabu	680	Kecil
32		PROVINSI PAPUA	840	Besar
	32.01	Kab. Biak Numfor	742	Sedang
	32.02	Kab. Jayapura	1,638	Besar
	32.03	Kab. Jayawijaya	1,084	Besar
	32.04	Kab. Merauke	633	Sedang
	32.05	Kab. Mimika	876	Besar
	32.06	Kab. Nabire	1,151	Besar
	32.07	Kab. Paniai	804	Besar
	32.08	Kab. Puncak Jaya	762	Sedang
	32.09	Kab. Kepulauan Yapen	734	Sedang
	32.10	Kota Jayapura	1,184	Besar
	32.11	Kab. Sarmi	426	Kecil
	32.12	Kab. Keerom	748	Sedang
	32.13	Kab. Yahukimo	720	Sedang
	32.14	Kab. Pegunungan Bintang	678	Sedang
	32.15	Kab. Tolikara	599	Kecil
	32.16	Kab. Boven Digoel	801	Besar
	32.17	Kab. Mappi	630	Sedang
	32.18	Kab. Asmat	538	Kecil
	32.19	Kab. Waropen	641	Sedang
	32.20	Kab. Supiori	734	Sedang
	32.21	Kab. Mamberamo Raya	734	Sedang
	32.22	Kab. Membramo Tengah	781	Sedang
	32.23	Kab. Yalimo	955	Besar
	32.24	Kab. Lanny Jaya	1,092	Besar
	32.25	Kab. Nduga	470	Kecil
	32.26	Kab. Dogiyai	549	Kecil

No.		PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
			SKOR	KATEGORI
	32.27	Kab. Puncak	762	Sedang
	32.28	Kab. Intan Jaya	734	Sedang
	32.29	Kab. Deiyai	728	Sedang
33		PROVINSI PAPUA BARAT	1,106	Besar
	33.01	Kab. Fak Fak	1,014	Besar
	33.02	Kab. Manokwari	636	Sedang
	33.03	Kab. Sorong	949	Besar
	33.04	Kota Sorong	1,028	Besar
	33.05	Kab. Raja Ampat	426	Kecil
	33.06	Kab. Sorong Selatan	470	Kecil
	33.07	Kab. Teluk Bintuni	484	Kecil
	33.08	Kab. Teluk Wondama	728	Sedang
	33.09	Kab. Kaimana	722	Sedang
	33.10	Kab. Maybrat	594	Kecil
	33.11	Kab. Tambrauw	426	Kecil
	33.12	Kab. Manokwari Selatan	456	Kecil
	33.13	Kab. Pegunungan Arfak	412	Kecil
34		PROVINSI DI YOGYAKARTA	860	Besar
	34.01	Kab. Bantul	808	Besar
	34.02	Kab. Gunung Kidul	866	Besar
	34.03	Kab. Kulon Progo	788	Sedang
	34.04	Kab. Sleman	900	Besar
	34.05	Kota Yogyakarta	860	Besar

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA